

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sepak bola merupakan salah satu olahraga yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik di berbagai negara. Dalam konteks global, sepak bola tidak hanya dipandang sebagai aktivitas olahraga semata, tetapi juga sebagai sarana pembentukan identitas nasional suatu negara di kancah internasional (Goldblatt, 2006). Oleh karena itu, keberhasilan tim nasional dalam kompetisi internasional sering kali menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan olahraga suatu negara.

Dalam konteks Indonesia, sepak bola memiliki basis pendukung yang sangat besar, namun capaian prestasi di tingkat internasional masih relatif tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia, seperti Jepang dan Korea Selatan, maupun di tingkat regional ASEAN seperti Thailand dan Vietnam. Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan struktural dalam sistem sepak bola nasional, mulai dari pembinaan pemain usia dini, kualitas kompetisi domestik, hingga manajemen organisasi sepak bola yang belum optimal (Fauzi, 2022). Keterbatasan ini kemudian mendorong munculnya berbagai kebijakan strategis yang diharapkan mampu meningkatkan performa tim nasional secara cepat.

Salah satu kebijakan yang menonjol adalah naturalisasi pemain sepak bola, yang didukung oleh kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Kebijakan ini memungkinkan pemain asing atau pemain keturunan Indonesia yang berkembang di luar negeri untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan memperkuat tim nasional. Dalam praktiknya, naturalisasi sering dipandang sebagai solusi instan untuk meningkatkan kualitas tim nasional, terutama karena pemain diaspora yang berkarier di luar negeri, khususnya di Eropa, dianggap memiliki kualitas teknis, pengalaman kompetisi, serta kedisiplinan yang lebih baik dibandingkan pemain lokal (Erick Thohir, 2024).

Fenomena naturalisasi tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain sebagai bagian dari strategi peningkatan daya saing tim nasional. Qatar, misalnya, secara aktif menerapkan kebijakan naturalisasi sebagai bagian dari strategi pembangunan sepak bola nasional dan berhasil meraih kesuksesan dengan menjuarai Piala Asia 2019. Filipina juga memanfaatkan pemain diaspora untuk memperkuat tim nasionalnya, sementara Vietnam mengombinasikan kebijakan naturalisasi dengan penguatan sistem pembinaan pemain lokal melalui akademi sepak bola (Yung, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa naturalisasi telah menjadi praktik yang cukup umum dalam sepak bola modern, khususnya di negara berkembang.

Kebijakan naturalisasi juga menimbulkan berbagai kritik. Salah satu kritik utama adalah bahwa naturalisasi berpotensi menghambat perkembangan pemain lokal karena mengurangi kesempatan bermain di level internasional. Selain itu, ketergantungan pada pemain naturalisasi juga dinilai dapat melemahkan upaya pembangunan sistem sepak bola nasional yang berkelanjutan, karena fokus lebih diarahkan pada pencapaian hasil jangka pendek dibandingkan dengan pembinaan jangka panjang (Fauzi, 2022). Dengan demikian, naturalisasi tidak hanya menjadi isu teknis olahraga, tetapi juga mencerminkan dinamika kebijakan yang lebih kompleks.

Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari cara pandang terhadap kualitas pemain dan sistem sepak bola itu sendiri. Pemain yang berkembang di luar negeri, khususnya di Eropa, sering kali dipersepsikan memiliki kualitas yang lebih unggul dibandingkan pemain lokal. Persepsi ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk menjadikan standar eksternal sebagai tolok ukur utama dalam menilai kualitas sepak bola nasional. Dalam banyak kasus, sistem pembinaan luar negeri dipandang lebih maju, sementara sistem domestik dianggap kurang memadai.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Mengapa cara pandang stakeholder sepak bola Indonesia terhadap pemain diaspora dan sistem sepak bola luar negeri memengaruhi kebijakan naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan naturalisasi pemain diaspora yang dilakukan oleh PSSI dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing tim nasional sepak bola Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kebijakan naturalisasi tersebut dapat dipahami melalui perspektif pascakolonial, terutama melalui konsep *inferiority complex* yang dikemukakan oleh Frantz Fanon serta konsep *mimicry* dari Homi K. Bhabha. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana persepsi mengenai superioritas sistem sepak bola Eropa memengaruhi cara pandang terhadap kualitas pemain diaspora dan pemain lokal dalam konteks sepak bola Indonesia. Melalui penelitian ini, penulis ingin memahami bagaimana kebijakan naturalisasi tidak hanya berfungsi sebagai strategi pragmatis dalam meningkatkan performa tim nasional, tetapi juga sebagai refleksi dari dinamika identitas, warisan kolonial, serta kecenderungan peniruan terhadap sistem yang dianggap lebih unggul dalam konteks sepak bola nasional.

### **1.4. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hubungan internasional dari perspektif pascakolonial, khususnya dalam memahami bagaimana warisan kolonial dan struktur kuasa global

membentuk kebijakan domestik dalam bidang olahraga. Penelitian ini menawarkan pendekatan alternatif dalam membaca fenomena naturalisasi pemain sebagai bagian dari dinamika politik identitas, bukan sekadar strategi teknis olahraga.

## **b. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi kebijakan bagi para pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pengembangan strategi persepakbolaan nasional, khususnya terkait penggunaan kebijakan naturalisasi pemain asing. Dengan menganalisis kebijakan naturalisasi dari sudut pandang poskolonialisme, penelitian ini memberikan wawasan kritis terhadap motif, dampak, serta keberlanjutan dari strategi ini. Temuan dari penelitian ini dapat membantu aktor-aktor kunci seperti PSSI, Kemenpora, pelatih tim nasional, hingga pengambil kebijakan olahraga nasional dalam merumuskan pendekatan yang lebih berimbang antara kebutuhan kompetitif jangka pendek dan pembangunan jangka panjang yang berbasis pembinaan lokal. Selain itu, penelitian ini juga mendorong pentingnya membangun identitas nasional yang inklusif dan strategis, tanpa terjebak pada ketergantungan instan terhadap sumber daya asing.

## **1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.5.1. Tinjauan Pustaka**

Naturalisasi pemain dalam sepak bola internasional telah berkembang melalui berbagai pendekatan analitis yang menyoroti dimensi struktural, identitas, hingga

strategi kompetitif negara. Secara umum, literatur dapat dikelompokkan ke dalam beberapa perspektif utama. Kelompok pertama berfokus pada naturalisasi sebagai strategi struktural dan instrumen kebijakan negara untuk meningkatkan daya saing olahraga. Penelitian oleh Schulting (2019) menunjukkan bahwa negara seperti Qatar menggunakan naturalisasi sebagai respons atas keterbatasan demografis dan minimnya talenta lokal, dengan mengadopsi skema *talent-for-citizenship*. Kebijakan ini diperkuat oleh fleksibilitas hukum kewarganegaraan yang memungkinkan percepatan naturalisasi atlet. Selain itu, strategi ini juga dikaitkan dengan upaya *soft power*, terutama dalam konteks ambisi global Qatar sebagai tuan rumah FIFA World Cup 2022. Meskipun studi ini memberikan kontribusi penting dalam memahami rasionalitas kebijakan negara, terdapat celah penelitian di mana fokus yang dominan pada efektivitas jangka pendek cenderung mengabaikan analisis keberlanjutan sistem pembinaan domestik serta dampaknya terhadap kemandirian sepak bola nasional.

Kelompok kedua menyoroti naturalisasi dalam kaitannya dengan identitas nasional dan legitimasi sosial. Studi oleh Yung (2019) dalam konteks Hong Kong menunjukkan bahwa penerimaan terhadap pemain naturalisasi bersifat pragmatis dan instrumental. Para pemangku kepentingan sepak bola cenderung mengabaikan aspek etnisitas dan sejarah, selama pemain naturalisasi mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap performa tim nasional. Hal ini mencerminkan fleksibilitas identitas nasional dalam konteks olahraga modern. Namun demikian, literatur ini masih menyisakan celah berupa kurangnya eksplorasi kritis mengenai bagaimana

penerimaan instrumental tersebut memengaruhi konstruksi identitas nasional dalam jangka panjang, khususnya dalam konteks negara dengan dinamika politik dan kultural yang kompleks.

Kelompok ketiga mengkaji naturalisasi sebagai respons terhadap inferioritas kompetitif dan tekanan standar internasional. Penelitian oleh Robin (2011) dalam kasus Turkey menunjukkan bahwa kebijakan naturalisasi tidak hanya berfungsi sebagai strategi teknis, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mengatasi kompleks inferioritas terhadap standar sepak bola Eropa. Dalam konteks ini, naturalisasi menjadi alat untuk memenuhi ekspektasi publik sekaligus membangun kembali kebanggaan nasional melalui peningkatan performa di level internasional. Meskipun demikian, fokus literatur ini masih terbatas pada dimensi psikologis dan simbolik, sehingga terdapat kekosongan analisis terkait bagaimana kebijakan tersebut berinteraksi dengan struktur kelembagaan sepak bola domestik dan kebijakan jangka panjang negara.

Kelompok literatur keempat mengeksplorasi naturalisasi dalam kerangka mobilitas migran dan integrasi sosial. Studi oleh Goździak dan Chantavanich (2022) dalam konteks Thailand menunjukkan bahwa sepak bola menjadi medium mobilitas sosial bagi migran, khususnya dari Afrika, untuk memperoleh legitimasi profesional. Meskipun demikian, integrasi yang terjadi bersifat parsial, di mana penerimaan didasarkan pada kontribusi teknis semata, sementara hambatan sosial dan stereotip rasial tetap ada. Literatur ini memperkaya pemahaman mengenai dimensi sosial

naturalisasi, namun masih menyisakan celah terkait bagaimana dinamika tersebut berimplikasi pada kebijakan kewarganegaraan formal dan posisi negara dalam mengelola keberagaman.

### **1.5.2. Kerangka Pemikiran**

#### **Postkolonialisme**

Studi hubungan internasional postkolonialisme berangkat dari kritik terhadap dominasi perspektif Barat (Western-centric) yang mengabaikan pengalaman negara-negara Dunia Ketiga. Teori ini menolak klaim universalitas dan netralitas pengetahuan yang dihasilkan dari pengalaman kolonial Eropa, terutama karena seringkali menghapus peran negara-negara bekas koloni dalam narasi global. Pascakolonialisme dalam hubungan internasional menekankan pentingnya memperhatikan bagaimana kekuasaan kolonial dan warisannya masih memengaruhi struktur global, termasuk dalam produksi pengetahuan, identitas, dan hubungan kuasa antara negara. Dalam konteks ini, negara-negara non-Barat bukan sekadar objek studi, melainkan subjek aktif yang memiliki sejarah, dinamika, dan kontribusi tersendiri (Mohamad Rosyidin, 2021).

Poskolonial juga dikembangkan oleh Edward Said yang menekankan bahwa kolonialisme tidak hanya berlangsung melalui dominasi politik dan ekonomi, tetapi juga melalui produksi pengetahuan. Dalam karyanya *Orientalism* (1978), Said menjelaskan bahwa Barat secara historis membangun representasi tentang Timur

sebagai pihak yang berbeda, tertinggal, dan kurang rasional. Representasi ini kemudian membentuk cara pandang global yang menempatkan Barat sebagai pusat kemajuan dan standar utama dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, poskolonialisme melihat bahwa relasi kekuasaan antara Barat dan non-Barat terus berlanjut dalam bentuk yang lebih halus melalui wacana, pengetahuan, dan standar yang dianggap “universal”.

Homi K. Bhabha juga menekankan bahwa hubungan antara bekas penjajah dan yang dijajah tidak bersifat statis, melainkan penuh dengan negosiasi identitas. Dalam pemikirannya, masyarakat pascakolonial tidak hanya menjadi objek dominasi, tetapi juga secara aktif merespons dan membentuk ulang identitas mereka dalam interaksi dengan pengaruh Barat. Hal ini menunjukkan bahwa warisan kolonial tidak hanya meninggalkan ketimpangan struktural, tetapi juga membentuk cara masyarakat memahami diri mereka sendiri dalam hubungannya dengan dunia luar. Oleh karena itu, pendekatan poskolonial berupaya mengungkap bagaimana identitas dan cara pandang tersebut terus direproduksi dalam berbagai sektor, termasuk dalam kebijakan dan praktik sosial (Milostivaya et al., 2017).

### **Frantz Fanon - *inferiority complex***

Dalam kerangka teori poskolonial, pemikiran Frantz Fanon memegang peranan penting dalam mengkaji dampak psikologis kolonialisme terhadap masyarakat jajahan. Melalui karya monumentalnya *Black Skin, White Masks* (1952),

Fanon mengungkapkan bagaimana penjajahan tidak hanya menundukkan wilayah secara fisik, tetapi juga memanipulasi kesadaran subjek terjajah hingga menimbulkan kompleks inferioritas (*inferiority complex*). Fanon menyoroti bahwa dominasi Barat terhadap Timur khususnya terhadap ras kulit hitam berlangsung melalui penanaman nilai-nilai budaya kolonial yang secara sistematis membuat budaya lokal dianggap lebih rendah. Akibatnya, individu terjajah menginternalisasi pandangan inferior terhadap dirinya sendiri dan masyarakatnya, serta mengidealkan budaya penjajah.

Fanon mengembangkan dua konsep kunci dalam bukunya, yakni *laktifikasi* dan *eretisme afektif*, yang menjelaskan mekanisme psikologis dari kompleks inferioritas ini. *Laktifikasi* merujuk pada dorongan untuk meniru penjajah, baik dari segi bahasa, gaya hidup, maupun nilai-nilai sosial. Sikap ini muncul sebagai bentuk simbolik dari keinginan untuk "menjadi putih" atau menyerupai penjajah demi meraih legitimasi dan pengakuan sosial. Fanon menunjukkan bahwa bahasa, sebagai simbol budaya, sering kali menjadi medan utama asimilasi. Dalam konteks ini, masyarakat jajahan cenderung mengadopsi bahasa penjajah dan menyingkirkan bahasa lokal sebagai bentuk upaya untuk naik derajat secara sosial, meskipun justru memperdalam keterasingan dari identitas aslinya.

Konsep kedua, *eretisme afektif*, menggambarkan bentuk penolakan eksistensial terhadap identitas diri akibat tekanan sosial dan budaya kolonial. Individu yang mengalami kondisi ini akan membenci karakteristik fisik dan kultural dirinya seperti warna kulit, bentuk tubuh, dan logat bicara dan sebaliknya mengidealkan

semua atribut penjajah. Fanon menggambarkan kondisi ini sebagai penyakit psikis yang diderita oleh masyarakat terjajah akibat proses dehumanisasi yang berlangsung lama. Kedua konsep ini relevan dalam menganalisis bagaimana warisan kolonial membentuk relasi kuasa dalam tatanan internasional kontemporer serta dalam membongkar bias-bias epistemologis dalam studi hubungan internasional dari perspektif poskolonial.

### **Homi K. Bhabha - *Mimicry***

Selain konsep inferioritas kompleks, Homi K. Bhabha memperkenalkan konsep *mimicry* dalam kajian poskolonial. *Mimicry* merujuk pada kecenderungan masyarakat pascakolonial untuk meniru praktik, nilai, atau standar yang berasal dari Barat sebagai bentuk upaya untuk mencapai kesetaraan atau pengakuan. Namun, peniruan ini tidak pernah sepenuhnya identik, melainkan menghasilkan posisi yang “hampir sama tetapi tidak sepenuhnya”, sehingga tetap menempatkan pihak yang meniru dalam posisi subordinat. Dalam konteks sepak bola Indonesia, konsep ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan naturalisasi pemain diaspora mencerminkan upaya meniru standar sepak bola Eropa yang dianggap lebih maju, meskipun tidak sepenuhnya mampu menghilangkan ketimpangan struktural yang ada.

### **Relevansi teori dengan studi kasus**

Pemikiran poskolonial tidak hanya memberikan kerangka untuk memahami warisan kolonial secara historis, tetapi juga membantu menjelaskan bagaimana cara pandang dan kebijakan dalam konteks kontemporer masih dipengaruhi oleh relasi kuasa global. Dalam penelitian ini, konsep inferioritas kompleks dari Frantz Fanon dan *mimicry* dari Homi K. Bhabha, digunakan secara bersamaan untuk membaca fenomena naturalisasi pemain dalam sepak bola Indonesia. Dari perspektif Fanon, kolonialisme membentuk kecenderungan psikologis di mana bangsa pascakolonial memandang dirinya lebih rendah dibandingkan dengan Barat. Hal ini kemudian tercermin dalam preferensi terhadap pemain diaspora yang dianggap memiliki kualitas lebih tinggi karena terbentuk dalam sistem sepak bola Eropa. Namun, fenomena ini tidak berhenti pada inferioritas semata. Dalam kerangka *mimicry* yang dikemukakan oleh Bhabha, strategi naturalisasi juga dapat dipahami sebagai bentuk peniruan terhadap model keberhasilan sepak bola negara-negara maju.

Upaya menghadirkan pemain dengan latar belakang Eropa mencerminkan keinginan untuk mendekati standar global, meskipun tidak sepenuhnya mampu mereplikasi sistem tersebut secara utuh. Dengan demikian, naturalisasi menjadi bentuk “menjadi seperti yang lain”, tetapi tetap berada dalam posisi yang tidak sepenuhnya setara. Dalam konteks ini, preferensi terhadap pemain diaspora bukan hanya pilihan teknis, melainkan juga hasil dari internalisasi norma global yang menempatkan Barat sebagai pusat rujukan kualitas. Dengan demikian, strategi

naturalisasi pemain dalam sepak bola Indonesia tidak hanya dapat dipahami sebagai kebijakan pragmatis untuk meningkatkan performa tim nasional, tetapi juga sebagai manifestasi dari dinamika psikologis, kultural, dan struktural yang saling berkaitan. Kombinasi kedua konsep tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini merefleksikan warisan poskolonial yang masih mempengaruhi cara pandang stakeholder sepak bola Indonesia dalam mendefinisikan kualitas dan kemajuan.

## **1.6. Operasionalisasi Konsep**

### **1.6.1. Definisi Konseptual**

#### **1. Naturalisasi**

Naturalisasi adalah proses pemberian kewarganegaraan kepada warga negara asing melalui mekanisme hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam konteks sepak bola Indonesia, naturalisasi pemain dilakukan sebagai bentuk pewarganegaraan istimewa berdasarkan kepentingan negara (Pasal 20), yang dalam praktiknya difasilitasi oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk memperkuat tim nasional (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia).

## **2. Inferioritas Kompleks**

Salah satu konsep utama yang digunakan adalah inferioritas kompleks sebagaimana dikemukakan oleh Frantz Fanon. Konsep ini merujuk pada kondisi psikologis di mana individu atau kelompok dalam masyarakat pascakolonial merasa dirinya lebih rendah dibandingkan dengan pihak lain yang dianggap lebih maju, terutama Barat. Perasaan inferior ini terbentuk melalui internalisasi nilai-nilai kolonial yang menempatkan standar Barat sebagai ukuran utama dalam menilai kualitas dan kemajuan (Fanon, 1986).

## **3. *Mimicry***

konsep *mimicry* yang dikemukakan oleh Homi K. Bhabha digunakan untuk menjelaskan praktik peniruan terhadap budaya atau sistem dari pihak dominan. *Mimicry* menghasilkan kondisi ambivalen, yaitu “hampir sama tetapi tidak sepenuhnya”, yang menunjukkan bahwa pihak yang meniru tetap berada dalam posisi subordinat meskipun berusaha menyerupai pihak dominan (Bhabha, 1994).

### **1.6.2. Definisi operasional**

#### **1. Naturalisasi**

Seorang pemain dikategorikan sebagai pemain naturalisasi apabila memenuhi beberapa kriteria utama, pertama, ia lahir di luar wilayah negara yang kini diwakilinya dan tidak memperoleh kewarganegaraan secara otomatis berdasarkan

kelahiran di negara tersebut. Kedua, kewarganegaraan yang dimilikinya adalah hasil dari proses permohonan resmi, bukan melalui hubungan darah atau keturunan langsung . Ketiga, biasanya tidak memiliki ikatan genealogis yang kuat dengan negara baru tersebut, meskipun dalam beberapa kasus terdapat pengecualian di mana pemain memiliki nenek moyang dari negara tersebut, seperti yang terjadi pada pemain Jordi Amat atau Pattynama. Namun, jika pemain memiliki hubungan darah langsung dengan warga negara melalui orang tua atau kakek-nenek, statusnya cenderung masuk dalam jalur kewarganegaraan berdasarkan keturunan, bukan murni naturalisasi.

## **2. Inferioritas**

Dalam konteks penelitian ini, inferioritas dioperasionalkan sebagai kondisi psikososial yang tercermin dalam kecenderungan institusi olahraga, seperti PSSI, untuk lebih memercayai kemampuan dan otoritas pemain asing daripada membangun potensi lokal. Inferioritas tampak dari praktik naturalisasi yang mengutamakan pemain dengan latar belakang pelatihan di Eropa, meskipun tanpa keterikatan genealogis atau kultural yang kuat dengan Indonesia. Fenomena ini mencerminkan internalisasi superioritas Barat dan rendahnya kepercayaan terhadap kualitas lokal, di mana pemain asing diposisikan sebagai simbol profesionalisme dan kemajuan. Mengacu pada konsep laktifikasi dan eretisme afektif dari Frantz Fanon, inferioritas juga dimanifestasikan melalui upaya simbolik “menjadi seperti penjajah” dengan mengadopsi standar asing sebagai tolok ukur utama. Secara lebih luas, gejala

inferioritas ini dapat diamati dalam narasi kebijakan dan representasi media yang memperkuat persepsi bahwa keberhasilan hanya dapat dicapai melalui model-model Barat, bukan melalui penguatan dari dalam.

### **3. *Mimicry***

*Mimicry* dioperasionalkan sebagai praktik peniruan terhadap model pengelolaan dan pengembangan sepak bola dari negara-negara maju. Peniruan ini tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga mencakup strategi kebijakan yang dianggap mampu menghasilkan keberhasilan secara instan. Dalam konteks ini, naturalisasi pemain dapat dipahami sebagai bentuk *shortcut policy* yang meniru praktik negara lain tanpa sepenuhnya mempertimbangkan kesiapan struktur domestik. Indikator dari *mimicry* dapat dilihat dari adanya upaya untuk mereplikasi standar global, namun tanpa diiringi dengan pembangunan sistem pembinaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, praktik ini mencerminkan kondisi “hampir sama tetapi tidak sepenuhnya”, di mana upaya peniruan tetap berada dalam batas-batas ketidaksetaraan struktural.

#### **1.7. Argumen Penelitian**

Dalam kerangka pascakolonial, strategi naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI dalam upaya meningkatkan kualitas tim nasional Indonesia mencerminkan manifestasi dari *inferiority complex* atau rasa rendah diri yang tertanam akibat warisan kolonialisme. Konsep *inferiority complex* sebagaimana dijelaskan oleh Frantz

Fanon menunjukkan bahwa subjek pascakolonial cenderung memandang pihak luar khususnya Barat sebagai representasi superioritas, baik dari segi fisik, taktik, maupun profesionalisme, sementara kapasitas lokal dipersepsikan sebagai kurang kompetitif. Hal ini tercermin dari pola naturalisasi pemain yang secara mayoritas berasal dari negara bekas penjajah, terutama Belanda, di mana pemain keturunan Indonesia (diaspora) yang lahir dan berkembang dalam sistem sepak bola Eropa dinilai lebih layak membela tim nasional dibandingkan pemain lokal.

Lebih lanjut, fenomena ini tidak hanya merefleksikan kondisi psikologis berupa inferioritas, tetapi juga termanifestasi dalam praktik kebijakan melalui apa yang oleh Homi K. Bhabha disebut sebagai *mimicry*. Dalam konteks ini, kebijakan naturalisasi dapat dipahami sebagai bentuk upaya untuk meniru atau mereplikasi standar dan model pengembangan sepak bola Barat yang dianggap lebih maju. Namun, praktik *mimicry* tersebut tidak menghasilkan kesamaan yang utuh, melainkan menciptakan kondisi ambivalen “hampir sama, tetapi tidak sepenuhnya” di mana Indonesia berupaya mendekati standar sepak bola Eropa tanpa memiliki fondasi struktural yang sepenuhnya setara. Dengan demikian, strategi naturalisasi tidak semata-mata merupakan pertimbangan teknis, melainkan mencerminkan bentuk di mana aktor kebijakan secara tidak sadar mereproduksi relasi kuasa kolonial dengan mengidealkan “yang asing” dan secara simultan memarginalkan potensi domestik. Dalam konteks ini, PSSI tidak sepenuhnya bertindak sebagai aktor yang otonom dalam merumuskan strategi pengembangan sepak bola nasional, melainkan masih

berada dalam bayang-bayang logika subordinatif yang terbentuk dari warisan kolonial. Oleh karena itu, kebijakan naturalisasi dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara dinamika psikologis (inferioritas kompleks) dan praktik kultural (mimicry) dalam konteks pascakolonial yang lebih luas.

### **1.8. Metode Penelitian**

Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang mengumpulkan data dari pengaturan alam dan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci, daripada menghasilkan dalam bentuk prosedur atau perhitungan statistik, yang dilakukan dalam desain penelitian yang bertujuan untuk mengklarifikasi fenomena kontekstual (Ultavia,2023). Penelitian kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi subjek dan merasakan apa yang dirasakan subjek dalam kehidupan sehari-hari, sehingga peneliti akan mengerti latar belakang suasana serta kejadian natural sesuai dengan yang sedang diteliti.

#### **1.8.1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif dengan tipe eksplanatif**, yang bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam hubungan antara strategi naturalisasi pemain asing dengan motif politik identitas, nasionalisme, dan warisan kolonial dalam kebijakan olahraga Indonesia. Penelitian eksplanatif kualitatif digunakan untuk menggali mengapa dan bagaimana strategi ini diambil oleh negara

serta bagaimana konsekuensinya terhadap dinamika identitas nasional dan representasi dalam sepak bola.

### **1.8.2. Situs Penelitian**

Penelitian ini dilakukan secara daring (online) melalui zoom karena data utama dikumpulkan melalui dokumentasi berita digital dan wawancara jarak jauh. Situs penelitian meliputi media daring nasional (seperti *Kompas.com*, *CNN Indonesia*, *Bola.net*), platform media sosial resmi (seperti Instagram atau Twitter PSSI).

### **1.8.3. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sebagai institusi yang memiliki peran sentral dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan naturalisasi pemain asing. PSSI dipilih karena keterlibatannya secara langsung dalam proses seleksi, pengajuan, dan legalisasi naturalisasi, serta sebagai aktor utama yang berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, media, dan publik sepak bola nasional.

### **1.8.4. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni data dalam bentuk narasi, teks, kutipan, dan opini yang diperoleh dari hasil wawancara, berita, artikel, serta dokumen resmi. Data ini digunakan untuk

menggambarkan persepsi, rasionalitas kebijakan, serta dinamika sosial-politik yang menyertai proses naturalisasi pemain asing dalam konteks sepak bola nasional.

#### **1.8.5. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan yang relevan, termasuk pejabat atau mantan pejabat PSSI, serta pengamat olahraga yang memahami dinamika internal organisasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berita daring, pernyataan resmi PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dokumen hukum seperti Undang-Undang Kewarganegaraan, serta publikasi ilmiah yang membahas konsep *jus talenti*, politik identitas, dan postkolonialisme dalam ranah olahraga.

#### **1.8.6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode. Pertama, wawancara semi-terstruktur secara daring digunakan untuk menggali pandangan mendalam dari narasumber yang terlibat langsung atau memahami kebijakan naturalisasi. Kedua, studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berita digital, dokumen kebijakan, artikel opini, serta sumber lain yang relevan untuk memperkuat data primer. Ketiga, observasi pasif terhadap media sosial digunakan untuk memantau respons publik terhadap pemain naturalisasi serta isu-isu yang berkaitan dengan identitas nasional dan nasionalisme.

### **1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data**

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis tematik (*thematic analysis*) sebagaimana dikembangkan oleh (Braun dan Clarke,2006). Peneliti akan membaca, mengorganisasi, dan mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama seperti motif naturalisasi, nasionalisme, sentimen publik, performa atlet, serta aspek postkolonialisme. Interpretasi dilakukan secara induktif, dengan cara mengaitkan temuan lapangan dengan kerangka teori yang digunakan, khususnya teori *jus talenti* dan inferioritas pascakolonial, untuk memahami dinamika ideologis dan politis yang melatarbelakangi kebijakan naturalisasi.

### **1.8.8. Kualitas Data (*Goodness Criteria*)**

Untuk memastikan validitas dan kredibilitas temuan, penelitian ini menggunakan beberapa kriteria kualitas data. *Credibility* dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan data dokumentasi, serta melakukan *member checking* kepada narasumber untuk memastikan akurasi informasi. *Transferability* dicapai dengan menyajikan deskripsi kontekstual yang mendalam agar hasil penelitian dapat digunakan dalam studi serupa. *Dependability* dijamin melalui pencatatan proses analisis yang sistematis dan transparan. Terakhir, *confirmability* diwujudkan dengan memastikan bahwa interpretasi data dilakukan secara objektif, serta menghindari bias pribadi peneliti melalui dokumentasi dan refleksi kritis selama proses analisis.